

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penulis mendapat informasi yang sangat beragam dari informan berkaitan dengan Implementasi Prinsip *Good Governance* pada Pemerintahan Desa Pendolo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

Berikut ini penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan indikator yang digunakan dan selanjutnya menyimpulkan secara general atau umum tentang bagaimana Implementasi Prinsip *Good Governance* pada Pemerintahan Desa Pendolo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso sebagai berikut :

1. Implementasi Prinsip *Good Governance* pada Pemerintahan Desa Pendolo kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso

Penerapan prinsip Akuntabilitas dalam pemerintahan Desa Pendolo sudah optimal. Namun yang paling mempengaruhi gerak lajunya pertumbuhan dan perkembangan desa adalah perlu ditingkatkan lagi skill dan pengetahuan aparat desa. Agar bisa menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik.

Penerapan Prinsip Transparansi dari Pemerintah Desa Pendo sejauh ini sudah baik. Namun perlu ditingkatkan lagi sarana dan prasarana guna untuk menyebarluaskan informasi, Dan juga perlu adanya perubahan untuk lebih baik lagi demi kepentingan Desa selanjutnya.

Penerapan prinsip Partisipasi masyarakat bersama Pemerintah Desa menurut penulis sudah cukup baik. Masyarakat dan Pemerintah bekerjasama

dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga lingkungan desa Pendolo lingkungan dengan baik.

Penerapan prinsip Responsivitas sudah diterapkan dalam pemerintahan desa. Penyusunan perencanaan pembangunan yang disusun pada saat Musrembang merupakan sebagian hasil dari aspirasi-aspirasi masyarakat, tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat Desa.

2. Faktor-faktor yang berpengaruh pada pengimplementasian Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintahan Desa Pendolo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso yaitu :

a. Faktor Pendukung

Kerjasama sudah terbangun baik diantara Pemerintah Desa maupun antara Pemerintah Desa dan Masyarakat. Kemudian, Komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dan juga masyarakat sudah optimal.

b. Faktor Penghambat

Sumberdaya Manusia khususnya aparat desa belum cukup maksimal dalam tata kelola pemerintahan yang baik, karena belum pernah dilakukan pelatihan untuk meningkatkan skill atau keahlian guna tujuannya untuk kepentingan masyarakat Desa. Akses informasi masih kurang, menyebabkan masyarakat sulit untuk mengetahui informasi penting dari Pemerintah desa.

## B. SARAN

Berdasarkan beberapa masalah permasalahan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka pada sub ini penulis ingin mengajukan beberapa saran yang diharapkan bias menjadi rekomendasi ilmiah yang bersifat konkrit dan operasional bagi perbaikan sejumlah kelemahan dalam Implementasi prinsip *Good Governance* pada Pemerintahan Desa Pendolo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan aparatur pemerintah Desa sehingga menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan di Desa. Saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana dalam Desa menjadi sesuatu yang sangat penting terutama sarana informasi sehingga menjadi kewajiban pemerintah Desa untuk melengkapi sarana dan prasarana agar masyarakat tidak ketinggalan informasi ketika ada program atau kegiatan didalam Desa. Untuk itu Pemerintah Desa perlu menindaklanjuti lagi dengan mengadakan papan informasi di setiap RT agar masyarakat bias dengan mudah mengakses informasi tersebut
2. Pemerintah Desa Pendolo harus membuat regulasi demi perlindungan dan pemanfaatan potensi yang berada di desa Pendolo. Sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Desa kedepan dan terlebih kepada masyarakat.